

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di negara sebesar Indonesia yakni sedang memiliki banyak permasalahan yang muncul di akibatkan karena negara indonesia mengalami masalah lingkungan yang di antaranya ialah dibidang perpolitikan, ekonomi serta maupun sosial, jadi demikian kita tidak bisa terlepas dari permasalahan yang di sebut kebijakan publik. Kebijakan publik mengenai pengertiannya ialah sekumpulan sebuah keputusan yang telah di sepakati oleh para aktor politik yang dengan tujuan mengatasi permasalahan yang ada di publik atau masyarakat. Jadi kebijakan publik ini sungguh menarik jika ingin di kaji dari segi pandangan Ilmu Politik nya karena kebijakan publik menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat.

Sebuah kota yang di mana pertumbuhan penduduknya yang terus meningkat setiap tahunnya di karenakan hal ini yang melatarbelakangi adanya konsep globalisasi guna untuk kemajuan bangsa serta negara. Apalagi di kota-kota di indonesia permasalahan mengenai penataan ruang yang di butuh kan di perkotaan yang sangat berguna untuk kebutuhan di masa depan, oleh karena itu dengan penambahan jumlah penduduk khususnya di daerah kota-kota besar khususnya di Palembang mengalami peningkatan jumlah dari 1.580.517 jiwa lalu ditahun 2015; 1.602.071 jiwa lalu ditahun 2016; 1.623.099 jiwa lalu ditahun 2017; serta 1.643.488 jiwa ditahun 2018.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/>

Pertambahan penduduk yang sangat pesat membuat masyarakat berkaktivitas jadi meningkatkan tiap waktunya pada segala bidang lalu masyarakat sangat membutuhkan akan ruang, ruang ini berupa taman atau yang lainnya yang di peruntukan untuk masyarakat oleh karena itu mengenai pemanfaatan dari ruang sungguh besar, akan tetapi ruang memiliki di dalam penggunaannya memiliki keterbatasan, sehingga dibutuhkan la sebuah rencana serta penyelenggaraan dari, ruang haruslah efektif agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati.<sup>2</sup>

Maka dari itu sebuah konsep atau perencanaan masalah penataan ruang haruslah sesuai arahan serta memiliki pedoman di dalam pelaksanaan nantinya. Wujud kebijakan dapat diperoleh pemerintahan dari mengatasi permasalahan penataan keseluruhan ruang di indonesia menurut UU RI No. 26 Tahun 2007 terkait masalah ruang. Kebijakan ini mengutamakan pembangunan ruang karena memiliki tujuan dan maanfaat yang besar untuk negara. Ada baiknya mengenai kebijakan ini membuat ruang bermanfaat jadi mengurangi adanya dampak lingkungan negatif dari pemanfaatan itu sendiri.<sup>3</sup>

Dengan berlakunya undang-undang mengenai penataan ruang pula diharapkan harus dipergunakan sebagai contoh bagi pemerintah untuk dapat mengatasi penataan dan melestarikan lingkungan hidup. Namu sampai kini kondisi yang ada masih belum searsi dengan kenyataan yang ada . dapat terlihat dari tantangan nan terjadi lebih-lebih semakin meningginya masalah banjir dan tanah lonfgsor, makin meningginya kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan,

---

<sup>2</sup> Bambang Susantono.( 2009). *Strategi Dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. hal. 81

<sup>3</sup> Bambang Susantono. *Op.cit.*, hal. 51

belum terlaksanan permasalahan permuukiman tidak layak, berkurangnya ruangs publik dan RTH Publik di wilayah perkotaan, dan belum teratasinya masalah perkembngan setiap daerah.<sup>4</sup>

Permasalahan kewajiban kota menyediakan RTH oleh pihak Pemda atas wilayah perkotaan sebelumnya sudah dimiliki tarnaunng di dalam UU No 24 Tahun 1992 mengenai Pernataan Ruang lalu di ikuti langsung dengan perintah Mendagri No 14 Tahunn 1998 terkait Pengadaan RTH. tapi penerapannya masih sangat kurang pada keadaan yang diinginkan seharusnya terlihat dalam luas RTH Kota Palembang di DPRKP masih amat kurang dari rasio RTH yang diwajibkan.

Hal ini terlihat dimana Luas wilayah Kota Palembang seluas 40.000 Ha, dan hanya memialiki ruang terbuka hijau yang tersedia adalah 4.000 Ha yang seharusnya 8.000 Ha. menurut persyaratan nan sudah ditetapkan mengharuskan luas yang ideal dari RTH dalam kota haruslah tidak kurang 30% dari luas wilayah kota tersebut, namun RTH diPalembang belum memenuhi persyarat dari apa yang telah di haruskan oleh karena itu pengertian tentang contoh RTH publik pada kota palembang beberapa di antaranya berupa jalur hijau, lalu hutan kota serta Taman Kota bagaikan seperti ini.

Taman kota ialah taman yang diuntukan sebagai RTH publik yang dimanfaatkan oleh rakyat untuk kebutuhan kepentingan semua pihak atau bersama serta dihias sebaik mungkin hingga memiliki keindahan, kenyamanan dan keamanan pada yang menggunakannya. Taman di wajibkan berlokasi harus yang berada di daerah yang strategis di lewati masyarakat. Beberapa sudut kota di

---

<sup>4</sup> Sirojuzilam.(2011). *Problematika Wilayah Kota dan Daerah*. Medan: USU Press. hal.

kawasan Palembang banyak bermacam-macam rancangan dibangun seperti taman kota yang berkontribusi sebagai khususnya keseimbangan kota dan menjadi daya tarik kota tersebut karena menambah artistik dan cantiknya wilayah kota itu.<sup>5</sup>

Lalu dibutuhkannya jalur hijau dikarenakan jalur hijau sendiri bermanfaat bisa mengurangi pencemaran dari adanya karbon yang dikeluarkan oleh asap kendaraan bermotor atau pun yang lainnya, dengan pelebaran jalan raya kudu diimbangi oleh sisi jalan yang di sisi hijau guna memperkuat wilayah kota itu serasi membuat penglihat dari pengguna jalan trotoar sisi jalan itu menjadi nyaman dan teduh.

Tak ketinggalan Pengertian dari sebuah lahan yang di tanami pohon-pohon yang difungsikan untuk mewujudkan ekologis dan estetis ialah pengertian dari hutan kota. Ini juga bermanfaat untuk menggabungkan beberapa kegiatan keluarga yang bisa dilakukan antara lain hiburan, rekreasi, wisata, olahraga dan bernilai jual yang di buat pejabat terkait atau dinas terkait sebagai hutan kota dalam kawasan hutan kota sebagai ruang publik

RTH Publik seyogyanya dithujukan guna menguatkan kecocokan antara keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan perkotaan ekosistemnya terwujud di perkotaan berguna menambah kualitas dari lingkungan kota yang nyaman, indah, sehat, serta, bersih. Terdapat di Pasal 1 UU No 26 Tahun 2007 terkait Pernataan Ruang RTH Diartikan bagaikan wilayah yang penggunaannya mengelompok atau memanjang yang memiliki sifat keterbuka, dengan tumbuhan

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, (PEDOMAN Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan)

tanaman yang baik, di tanam sendiri ataupun alami.<sup>6</sup>

Dalam bidang pembangunan taman Kota Palembang menjadi kota sedang bekerja keras guna memperbaiki di segala bidang. Salah satu diantaranya ialah perbaikan permasalahan tata kota dan RTH Public yakni khususnya sudah lama ada di Palembang, membutuhkan perhatian baik menggunakan berbagai kajian dan mengingatkan kebijakan RTH Public termasuk perbaikan ekosistem pada lingkungan khusus bagi suatu tempat yang mengalami perkembangan, oleh karena lingkungan berkualitas dengan adanya RTH Publik, dan di pertanyakan ialah sudahkah pemerintah Kota di Palembang yang diwakilkan oleh dinas terkait telah menjalankan penyediaan RTH Publik sebesar 30% cocok ataukah pas dengan pasal 29 ayat 3 yang diamanatkan terdapat di UU Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Palembang Kota Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW sudah menentukan sesungguhnya penataan ruang bertujuan itu sendiri ialah guna menghasilkan kota Palembang yang menjadi kota yang tepian sungainya terdapat pariwisata, perdagangan, dan jasa yang berlevel internasional tak lupa nyaman, aman, berbudaya, hijau, produktif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Agar bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuannya pemerintah kota Palembang telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah agar sudah membuat pengaturan polanya pun terdapat pada pasal 6 ayat (5) Perda No 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2032 berguna untuk meningkatkan RTH kota yang

---

<sup>6</sup> UU No.26 Tahun 2007

berkualitas guna menjadi paru-paru kota, Dari luas wilayah daratan kota Palembang untuk pengembangan RTH untuk bisa 30% dari total luas wilayah itupun terdapat didalamnya terdiri dari RTH bersifat privat seluas 10% dan RTH publik seluas 20% yang berupaya guna meningkatkan kota yang berkualitas.

Kebijakan Pemkot Palembang dalam bentuk Perda ini tentunya melewati seluruh tahap-tapan untuk kebijakannya dibuat contohnya kebijakan yang di agendakan, perumusann kebijakan, implementasih kebijakan, sampai kebijakannya dievaluasi. Serta yang menjadi fokus penelitian ini.

Penerapan suatu kebijakan bisa terlaksana jika memiliki artian pelaksanaan UU karena memiliki aktor, organisasis, prosedur, nan teknik bekerja beramai-ramai guna melaksanakan dari kebijakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan program tersebut.<sup>7</sup> Pada sistem politik penerapan suatu kebijakan berada di badan-badann untuk melaksanakan pekerjaan dari pemerintah setiap harinya yang b berdampak nuntuk warganya.<sup>8</sup> Oleh karenaitu dijadikanla tujuan diterpkannya kebijakann ini di 18 wilayah kecamatan yang tersebar di kota Palembang.

Jadi Peraturan Daerah yang menurut Kota Palembang No 15 Tahun 2012 sudah sangat memperjelas tujuannya, pengaturannya, dan strateginya dari Penataan Ruang guna menjadikan RTH di kota Palembang berefektif dari penyediaannya secara jangka panjang sampaih dengn Tahun 2032, yang memiliki tujuan kesejahteraan serta pola hidup sehat dan berimbang pada kehidupan

---

<sup>7</sup> Budi Winarno.(2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress. hal. 144

<sup>8</sup> Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 87.

masyarakat Kotanya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “**Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik**”, dalam penulisan skripsi ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi politik kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi politik kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi politik kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan ruang terbuka hijau publik?
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi politik kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi politik kebijakan tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bukan hanya bagi peneliti tapi juga akademisi lainnya mengenai kajian politik kebijakan dalam implementasinya terkait Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang. Serta dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa ilmu politik FISIP UIN Raden Fatah
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memahami implementasi Politik Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pertama Penelitian oleh Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal dan Agus R. Soeriaatmadja yang berjudul *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung* penelitian ini membahas identifikasi kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan studi yang memiliki karakter sebagai kawasan terbangun padat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan pendekatan urban landscape ekology (ekologi lanskap urban). Faktor manusia dan alam dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap tahap pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sistem ruang terbuka hijau yang sesuai dengan kebutuhan kawasan serta dapat memberikan kontribusi terhadap sistem pada skala yang lebih besar.<sup>9</sup>

Kedua Penelitian oleh Kiki Hidayat yang berjudul *Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014* penelitian ini membahas

---

<sup>9</sup> Widyastri Atsary Rahmy, et al. (2012). *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung*, Jurnal ruang terbuka hijau, Vol.1 No.1, h. 27.

ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu tahun 2014. Dengan titik kajian luas wilayah, luas ruang terbuka hijau publik dan persebaran ruang terbuka hijau publik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui standar penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek penelitian berupa ruang terbuka hijau publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu sudah mencukupi standar kebutuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kota kudus.

Ketiga Penelitian oleh Arya Banga Marbun berjudul Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga Di Perkotaan penelitian ini membahas tentang ruang terbuka hijau, sarana olah raga dan perkotaan, dalam perkotaan ruang terbuka hijau semakin berkurang khususnya sarana olahraga umum. Penelitian ini bertujuan diantaranya agar kota metropolitan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dari segi olahraga, kota metropolitan juga sebaiknya dapat memaksimalkan lahan yang tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan survey dan studi kasus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas Perbedaan dari penelitaian yang akan dilakukan berfokus pada ruang-ruang terbuka hijau untuk sarana olahraga dan perlunya penyediaan lahan olah

---

<sup>10</sup> Kiki Hidayat. (2014). *Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*, Skripsi Studi Pendidikan Geografi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, h. 55.

raga di perkotaan. <sup>11</sup>

Keempat Penelitian oleh Achmad Mukafi yang berjudul Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus penelitian ini membahas luasan ruang terbuka hijau publik dan Potensi ruang terbuka hijau publik yang berada di Kota Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Kudus sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dan mengetahui apa saja potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada potensi-potensi ruang terbuka hijau yang tersedia dan jumlah ruang terbuka hijau yang ada. <sup>12</sup>

Kelima Penelitian oleh Randi Ruslan yang berjudul Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene penelitian ini membahas proses pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pembangunan kota di Kabupaten Majene, peran pemerintah terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, mulai dari pola dasar pembangunan kota, analisis pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Metode penelitian digunakan adalah penelitian analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang Ruang Terbuka Hijau yang difokuskan pada pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di

---

<sup>11</sup>Arya Banga Marbun. (2007).*Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga di Perkotaan*, Skripsi Departemen Arsitektur, Depok, Universitas Indonesia, h.7.

<sup>12</sup>Achmad Mukafi. (2013). *Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus*, Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Semarang, h. viii.

Kabupaten Majene. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan terletak dari lokasi dan dan lebih berfokus pada pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau.<sup>13</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi Kebijakan Publik**

George C. Edwards menyatakan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua pertanyaan yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik.

Oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal

---

<sup>13</sup>Randi Ruslan. (2017). *Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, h. xvii

adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Patut diperhatikan disini bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, dan bagaimana variabel-variabel ini memengaruhi proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik yang dimaksud oleh George C. Edwards diantaranya:

1. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang

seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat dan kebijakan ini mesti akurat, jelas dan konsisten. Jika para pembuat keputusan ini berkehendak untuk melihat yang diimplementasikan tidak jelas dan bagaimana rinciannya maka kemungkinan akan timbul kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

Komunikasi yang tidak cukup juga memberikan implementor dengan kewenangan ketika mereka mencoba untuk membalik kebijakan umum menjadi tindakan- tindakan khusus. Kewenangan ini tidak akan perlu dilakukan untuk memajukan tujuan para pembuat keputusan aslinya. Dengan demikian, perintah-perintah implementasi yang tidak ditransmisikan, yang terdistorsi dalam transmisi, atau yang tidak pasti atau tidak konsisten mendatangkan rintangan-rintangan serius bagi implementasi kebijakan. Sebaliknya, ukuran-ukuran yang terlalu akurat mungkin merintangi implementasi dengan perubahan kreativitas dan daya adaptasinya.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau dengannya harus memberikan pelayanan. Sumberdaya yang tidak cukup akan

berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan. Para implementor kebanyakan bisa melakukan seleksi yang layak di dalam implementasi kebijakan. Salah satu dari berbagai alasan untuk ini adalah independensinya dari atasan (superior) nominal yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan mereka sendiri. Cara dimana para implementor ini melakukan seleksinya, bagaimanapun juga, bergantung sebagian besar pada disposisinya terhadap kebijakan. Sikap-sikapnya pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh berbagai pandangannya terhadap kebijakan masing-masing dan dengan cara apa mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasional dan pribadinya.

Para implementor tidak selalu siap untuk mengimplementasikan kebijakan sebagaimana mereka para pembuat kebijakan. Konsekuensinya, para pembuat keputusan sering dihadapkan dengan tugas untuk mencoba untuk memanipulasi atau mengerjakan semua disposisi implementor atau untuk mengurangi opsi-opsinya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Bahkan jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi mungkin merintangi koordinasi yang perlu

untuk mengimplementasikan dengan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang, dan mungkin juga memboroskan sumberdaya langka, merintangi perubahan, menciptakan kekacauan, mengarah kepada kebijakan bekerja dalam lintas tujuan, dan menghasilkan fungsi-fungsi penting yang terabaikan.

Sebagaimana unit-unit organisasional menyelenggarakan kebijakan mereka mengembangkan prosedur pengoperasian standard (*standart operating procedure* (SOP)) untuk menangani situasi rutin dalam pola hubungan yang beraturan. Malangnya, SOP yang dirancang untuk kebijakan-kebijakan masa depan sering tidak tepat bagi kebijakan-kebijakan baru dan mungkin menyebabkan perintang terhadap perubahan, penundaan, pemborosan, atau tindakan-tindakan yang diinginkan. SOP kadang merintangi bukan membantu implementasi kebijakan.

Teori implementasi kebijakan publik digunakan sebagai teori kedua di dalam penelitian ini karena relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu proses implementasi kebijakan pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau Publik. Teori ini digunakan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai aktor politik yang melaksanakan kebijakan dalam pencapaian program ditinjau dari variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan penyebab dari keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai bentuk politik kebijakan yang terjadi di dalam ruang lingkup aktor politik yang terlibat.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>14</sup> Istilah “Metode Penelitian” terdiri dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang mengikutinya adalah penelitian yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam setiap penelitian dan penulisan karya ilmiah baik makalah, skripsi, tesis dan lain-lain dibutuhkan suatu metode agar dapat diakui sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, adapun metode penelitian sendiri berarti cara yang harus dilalui dalam rangka pendalaman terhadap objek yang dikaji.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, 2011. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.253.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, 1982. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Bandung: CV. Transito), hal. 7.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut denzin dan licoln (2009)<sup>16</sup>, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Creswell (1998)<sup>17</sup>, menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dimana penelitian yang berusaha mendiskriptifkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data pada 2 komponen, yaitu:

### a. Data Primer

---

<sup>16</sup> Juliansyah Noor, 2011. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.33.

<sup>17</sup> *Ibid*.h.34.

<sup>18</sup> *Ibid*.h.35.

Data primer merupakan data yang didapat atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data Primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang bersifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer peneliti yaitu melakukan wawancara serta dokumentasi.<sup>19</sup>

b. Data Sekunder

data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, literatur, Jurnal koran, majalah, dan internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, tepatnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang dan beberapa anggota masyarakat untuk mendapatkan data-data atau informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam dunia ilmiah dikenal semboyan: “yakinkanlah orang secara logis dengan kerangka teoretis dan kerangka berpikir, serta buktikanlah secara empiris dengan pengumpulan data yang relevan”.<sup>21</sup> Adapun peneliti dalam penulisan ini menggunakan teknik

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto,(2002). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, h.133.

<sup>20</sup> *Ibid.*h.138.

<sup>21</sup> Husaini Usman, (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara).h.52.

sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>22</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di

---

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, (2011). *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.140.

wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

c. Dokumentasi

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.<sup>28</sup> Penyusunan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berupa data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah

---

<sup>23</sup> *Ibid.h.141.*

yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.<sup>24</sup>

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan penjabaran rencana penulisan untuk lebih memperjelas arah dalam penulisan karya ilmiah. Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci membagi penulisan skripsi ini ke dalam 4 (empat) bab. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu, di kota Palembang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.

**BAB III** : Hasil dan Pembahasan

**BAB IV** : Penutup, Kesimpulan dan Saran, atas keseluruhan hasil penelitian.

---

<sup>24</sup> Sugiono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta).h.335.